

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSEDUR PENGELUARAN KAS (*PAYMENT*) DI PT. X INDONESIA

Oleh: Mila Mardia Husna

Supervisor: Prof. Iwan Triyuwono, M.Ec, Ph.D, Ak.

This study aims to evaluate whether PT. X Indonesia has implemented internal control for payments adequately. The evaluation was performed with a qualitative approach through observation and testing on payment procedures and internal control environment, in consideration of the best practices of internal control which includes sufficient segregation of duties, proper authorization, adequate documents and records, physical control over assets and records, and independent and periodic review. The results showed that PT. X Indonesia has segregated the duties of each job function clearly, implemented proper authorization system, held adequate documents and records, implemented physical control to protect company's assets and records, and conducted independent review periodically. To conclude, PT. X Indonesia has implemented internal control for payments adequately.

Keywords: *Internal control, payment procedure, best practices, PT. X Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Penerapan sistem akuntansi menjadi suatu hal yang penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Gartenstein, 2011). Salah satu sistem akuntansi yang secara umum digunakan oleh perusahaan adalah sistem pengeluaran kas. Sistem ini menangani pengeluaran kas (*payment*) yang terjadi secara rutin pada sebuah perusahaan.

Kas merupakan komponen penting dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan operasional perusahaan. Sifatnya yang memiliki tingkat likuiditas paling tinggi daripada aset-aset perusahaan lainnya menjadikan kas sebagai sarana yang paling mudah dan rentan untuk disalahgunakan (Mulyadi, 2002). Oleh karena itu, diperlukan pengendalian intern terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi masing-masing bagian, yaitu bagian penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan (Bradford, 2011). Selain itu, juga diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi-fungsi pengeluaran kas (Arens dan Loebbecke, 2000).

Pengendalian intern yang baik terhadap kas memerlukan prosedur-prosedur yang memadai yang didesain untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan uang melalui pengeluaran kas (Crouthamel, 2013). Menurut hasil laporan audit mutu internal perusahaan tahun 2012, terdapat rekomendasi yang mengimplikasikan bahwa pengendalian intern perusahaan terhadap prosedur pengeluaran kas masih memerlukan perbaikan.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka disusun penelitian ini dengan judul: “Evaluasi Pengendalian Intern terhadap Prosedur Pengeluaran Kas (*Payment*) di PT. X Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengendalian intern atas prosedur pengeluaran kas (*payment*) di PT. X Indonesia sudah dilaksanakan dengan memadai.

2. PENGENDALIAN INTERN

Romney dan Steinbart (2009) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi berlangsungnya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Mustofa (1995), tujuan pengendalian intern suatu organisasi adalah untuk mengamankan harta perusahaan, memperoleh data yang dipercaya, melancarkan operasi dan efisiensi, serta mendorong terpatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.

Di dalam pengendalian intern ada unsur-unsur yang membuatnya berperan penting bagi suatu organisasi. Mulyadi (2002) menyebutkan bahwa terdapat lima unsur-unsur pokok pengendalian intern, yaitu (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Suatu sistem harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pengendalian intern agar mencapai tujuan pengendalian akuntansi. Terdapat lima prinsip prosedur pengendalian intern (Arens dan Loebbecke, 2000), yaitu:

- a) *Pemisahan tugas yang cukup*, yang didasarkan pada fungsi masing-masing bagian.
- b) *Otorisasi yang pantas untuk seluruh transaksi dan aktivitas*. Setiap transaksi harus diotorisasi secara memadai oleh pihak berwenang agar tercipta pengendalian efisien..
- c) *Dokumen dan catatan yang memadai*. Dokumen harus memadai untuk meyakinkan bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan transaksi dicatat dengan benar.
- d) *Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan*. Ada 3 kategori pengendalian, yaitu pengendalian fisik, pengendalian akses, dan prosedur cadangan dan pemulihan.
- e) *Pengecekan atas pelaksanaan prosedur secara independen dan berkala*. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus.

2.1 Pengujian Pengendalian Intern

Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian internal, terdapat dua macam pengujian yang dapat dilakukan (Mulyadi, 2002), yaitu (1) pengujian adanya kepatuhan melalui pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu, serta (2) pengujian tingkat kepatuhan melalui pengambilan sampel bukti transaksi yang disertai dengan kelengkapan dokumen pendukungnya beserta kelengkapan tanda tangan pejabat yang berwenang.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis kualitatif. Analisis dilakukan selama satu bulan per bulan Maret 2015 di kantor PT. X Indonesia yang berlokasi di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Data yang digunakan bersumber dari (1) data primer, yaitu data lapangan yang diperoleh langsung terkait dengan objek penelitian, dan (2) data sekunder, yang meliputi alur prosedur pengeluaran kas beserta *flowchart* dan dokumen-dokumen relevan.

Teknik analisis data melalui tahapan:

- a) Survei pendahuluan berbagai peraturan, ketentuan, kebijakan, serta standar operasional prosedur.
- b) Review dan pengujian pengendalian dengan menggunakan *check-list* dan melalui 2 tahap, yaitu (1) Pengujian dokumen atribut, dan (2) Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

Setelah itu, dilakukan pengujian berdasarkan kelima prinsip prosedur pengendalian (Arens dan Loebbecke, 2000).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. X Indonesia telah menerapkan pengendalian intern pengeluaran kas melalui dua prosedur, yaitu prosedur *advance bank payment* dan *procedural bank payment*.

4.1 Advance Bank Payment

Advance bank payment merupakan prosedur yang dimiliki PT. X Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran via bank terhadap tagihan yang bersifat *advance* atau di muka. Prosedur ini memiliki 3 tahap prosedur, yaitu tahap pengajuan, pemrosesan, dan penyelesaian permintaan pembayaran di muka.

Dalam tahap pengajuan, seorang *user* mempersiapkan dan mengajukan formulir dan dokumen permintaan pembayaran di muka dengan disertai oleh *supporting* dokumen ke

Finance Services Department untuk diverifikasi kebenarannya. Adapun yang termasuk ke dalam pembayaran di muka (*advance payment*) merupakan pembayaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas dan biaya administratif, serta pembayaran yang produk atau jasanya diterima setelah ada pembayaran dengan mengacu kepada kesepakatan kontrak.

Setiap dokumen permintaan pembayaran yang berhasil diverifikasi kemudian dibuatkan *bank payment voucher* oleh bagian *finance* lalu diajukan kepada Head of Finance dan President Director untuk diotorisasi dan disetujui agar dapat diproses lebih lanjut. Setelah itu, bagian *finance* dapat memprosesnya dengan melakukan pembayaran terkait dengan permintaan pembayaran di muka tersebut. Permintaan pembayaran yang sudah diproses oleh pihak *finance* lalu diserahkan kepada bagian *accounting* untuk dicatat ke dalam sistem akuntansi perusahaan (*tally record*) lalu menyerahkan *receipt* sebagai tanda terima agar ditandatangani oleh pihak *user* yang sebelumnya mengajukan permintaan pembayaran. Setelah pencatatan ke dalam *tally system*, dokumen dimasukkan ke dalam arsip. *Receipt* yang sudah ditandatangani oleh pihak *user* juga kemudian dimasukkan ke dalam arsip.

4.2 Procedural Bank Payment

Prosedur *procedural bank payment* merupakan prosedur yang digunakan oleh PT. X Indonesia untuk memfasilitasi semua transaksi pembayaran via bank. Adapun alur prosedur sebagian besar sama dengan prosedur *advance bank payment*, yaitu melalui tahap pengajuan, pemrosesan, dan penyelesaian permintaan pembayaran.. Yang membedakan antara kedua prosedur hanyalah bahwa pembayaran pada prosedur ini dilakukan oleh Finance Services Department setelah diterimanya barang dan/atau jasa oleh pihak user yang mengajukan permintaan pembayaran.

4.3 Lingkungan Pengendalian Intern Perusahaan

Analisis atas lima prinsip dilakukan terhadap lingkungan pengendalian intern.

PT. X Indonesia telah menegaskan bahwa adanya prosedur *advance bank payment* dan prosedur *procedural bank payment* bertujuan untuk memberikan batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap departemen yang terkait dalam proses permintaan pembayaran dan proses transaksi pembayaran via bank.

Sejak awal transaksi pengeluaran kas dimulai, sudah terdapat pemisahan tugas yang jelas antara pihak (*user*) yang melakukan permintaan pembayaran dengan pihak yang melakukan pembayaran yang menjadi tanggung jawab Finance Services Department. Di

dalam prosedur pengeluaran kas PT. X Indonesia telah dipisahkan fungsi-fungsi pokok dalam Finance Services Department perusahaan, diantaranya adalah: (a) fungsi akuntansi yang mencatat dan memasukkan transaksi ke dalam *tally system* serta mencetak A/P jurnal saat mencatat transaksi tersebut untuk dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran; (b) fungsi pajak yang mengidentifikasi dan menangani objek atau kewajiban pajak yang timbul atas setiap transaksi, terutama permintaan pembayaran yang berhubungan dengan tagihan supplier; dan (c) fungsi *finance* yang memproses seluruh pembayaran transaksi kepada *user/supplier* melalui *bank payment voucher*. Selain itu, suatu fungsi tidak diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi hingga selesai di dalam PT. X Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing bagian di FSD sudah memiliki tugas dan fungsi sendiri. Dengan demikian, setiap bagian hanya melakukan tugas yang menjadi fungsi mereka sendiri tanpa mencampuri fungsi bagian lainnya.

Di dalam prosedur pembayaran PT. X Indonesia, seluruh dokumen harus diotorisasi dan disetujui oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk mengotorisasi. Dalam pelaksanaannya pun, seluruh dokumen memang telah diotorisasi sebelum transaksi diproses lebih lanjut oleh Finance Services Department. Sistem wewenang atau otorisasi tersebut dimaksudkan PT. X Indonesia dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, serta biaya perusahaan.

PT. X Indonesia juga telah menegaskan bahwa adanya prosedur *advance bank payment* dan prosedur *procedural bank payment* bertujuan untuk memastikan bahwa suatu transaksi memiliki dokumentasi yang jelas dan lengkap sebagai data transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Finance Services Department. Sebagai upaya untuk pendokumentasian yang jelas di dalam lingkungan pengendalian intern prosedur pengeluaran kas, PT. X Indonesia mengharuskan agar setiap dokumen transaksi yang diproses Finance Services Department selalu dicatat ke dalam arsip. PT. X Indonesia juga memiliki tempat pengarsipan untuk dokumen-dokumen permintaan pembayaran dan juga *bank payment voucher* yang telah selesai diproses oleh Finance Services Department berdasarkan nomor urut dan tanggal. Perusahaan juga mengharuskan adanya arsip tersendiri yang dipegang oleh bagian *finance* untuk setiap dokumen permintaan pembayaran yang masuk dan diajukan ke Finance Services Department. Sistem pengarsipan tersebut sebagaimana yang tertuliskan di dalam SOP untuk prosedur *advance bank payment* dan prosedur *procedural bank payment*.

Lingkungan pengendalian intern PT. X Indonesia juga berfokus kepada pengendalian fisik atas aktiva dan catatan perusahaan untuk tujuan pengamanan, terutama yang relevan terhadap transaksi pembayaran. Penggunaan dokumen serta penyimpanan di dalam *tally system* khusus milik PT. X Indonesia harus selalu mencantumkan nomor urut dan tanggal. Dalam sistem pengarsipan pun, tersedia lemari sebagai tempat khusus berisikan folder “bantex” untuk pengarsipan file. PT. X Indonesia juga menerapkan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan dengan melakukan pencatatan transaksi pada saat transaksi terjadi atau segera setelah transaksi terjadi. Adanya token dan password *e-banking* yang hanya dimiliki dan diketahui oleh bagian *accounting* dan *finance* juga merupakan bentuk pengendalian fisik yang berupa pengendalian akses (*access control*) terhadap aktiva dan catatan perusahaan. Begitu pula dengan *username* dan *password* berbeda-beda yang dimiliki oleh masing-masing unit fungsional dalam mengakses *tally system*. Selain itu, PT. X Indonesia juga memberlakukan kebijakan bahwa dokumen permintaan pembayaran termasuk dokumen yang melengkapinya akan menjadi hak penuh Finance Services Department (FSD) saat dokumen tersebut diserahkan untuk diproses di FSD, begitu pula dengan voucher pembayaran bank termasuk dokumen yang melengkapinya. Setiap pemusnahan dokumen pun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selain itu, PETROOLS atau sistem akuntansi (*tally system*) yang digunakan oleh PT. X Indonesia memiliki prosedur cadangan dan pemulihan (*backup and recovery procedure*) yang merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan jika dalam kondisi kehilangan program atau data akuntansi di dalam *tally system*.

PT. X Indonesia memiliki bagian audit internal dan melaksanakan audit mutu internal secara berkala setiap beberapa bulan sekali oleh pihak audit internal tersebut. Selain itu, setiap minggu dengan hari yang tidak menentu Head of Finance yang memiliki ruangan sendiri selalu mengecek situasi di dalam lingkungan Finance Services Department untuk mengontrol kelancaran pelaksanaan prosedur serta memastikan apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh karyawan. Terlepas dari pelaksanaan audit internal, PT. X Indonesia juga menggunakan jasa audit eksternal dari salah satu “Big 4” kantor akuntan publik sebagai pihak yang independen. Dalam setiap tugasnya setiap tahun, auditor eksternal tersebut juga senantiasa melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan prosedur pengendalian intern di dalam PT. X Indonesia, khususnya di dalam FSD. Pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus. Pada akhirnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan

secara independen dan berkala tersebut dapat dijadikan sebagai informasi untuk penilaian dan perbaikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa PT. X Indonesia sudah melaksanakan pengendalian intern atas prosedur pengeluaran kas (*payment*) secara memadai karena baik prosedur maupun lingkungan pengendalian sudah memenuhi kelima prinsip penting dari pengendalian intern (Arens & Loebbecke, 2000) yang meliputi (1) Pemisahan tugas yang cukup, (2) Otorisasi yang pantas atas seluruh transaksi dan aktivitas, (3) Dokumen dan catatan yang memadai, (4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, dan (5) Pengecekan atas pelaksanaan prosedur secara independen dan berkala.

REFERENSI

- Al Haryono, Jusup. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi 6*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Arens, Alvin K. dan James K. Loebbecke. 2003. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Terjemahan Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rnika Cipta.
- Cahyadi, Andreas Indra. 2013. Analisis Pengujian Pengendalian Aktiva Tetap dalam Mendeteksi Kehilangan Aktiva Tetap pada STIKES Perdhaki Charitas Palembang. *Skripsi*. Palembang: STIE MDP.
- Crouthamel, Todd E. 2013. *Five Important Internal Controls for Cash Disbursements*. Kreischer Miller.
- Dokumentasi PT. X Indonesia.
- Freedman, John. 2008. *Accounting Transactions That Affect Balance Sheets*. Demand Media.
- Gartenstein, Devra. 2011. *What Is Necessary for a Good Accounting System?* Demand Media.
- Hamel, Gregory. 2008. *The Effects of Transactions on Cash Vs. Net Income*. Demand Media.
- Lincoln, Y.S. dan Guba, EC. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.

- Mawanda, Ssuuna Pius. 2008. *Effects of Internal Control Systems on Financial Performance in an Institution of Higher Learning in Uganda*. Disertasi. Uganda: Uganda Martyrs University.
- Moleong. 2005. *Metode Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2001. *Auditing 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Auditing 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, Emma Mutiara. 2009. Evaluasi Pengendalian Internal terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta. *Tugas Akhir*. Surakarta: Program Studi Diploma III Universitas Sebelas Maret.
- Romney, Marshal B., dan Steinbart, Paul John. 2009. *Accounting Information Systems*. USA: Cengage Learning.
- Salehi, Mahdi. 2010. *Usefulness of Accounting Information System in Emerging Economy: Empirical Evidence of Iran*. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 2, No. 2.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ulfa, Umi Maria. 2010. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Global Engineering Technology Jakarta. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro.